

PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN MANGROVE BERBASIS EKOWISATA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Studi kasus di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten
Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara

Oleh:

Lady Lovita Silaban dan Tjihno Windryanto

Abstract

The pressure of population growth, especially in coastal areas, resulting in a change in land use and utilization of natural resources unnecessarily, mangrove forests quickly became dwindling and broken throughout the tropics. Management of mangrove forest-based ecotourism done to overcome the damage mangrove forest land through educational activities. This mangrove ecotourism management research uses descriptive qualitative research methodology, collecting data through observation, interviews and documentation as well as involving respondents who have an important role.

The findings in the field, management of mangrove ecotourism "Kampoeng Nipah" at Sei Nagalawan is based on four indicators ie management; planning, organizing, implementation and monitoring. The conclusion was that the management of mangrove forest areas as ecotourism provide great opportunities for the community to develop the potential of the area where he lives. Only required serious attention and guidance from government. Government completes public facilities such as road repairs, finance and tourism development. The government provides broader space allocation, especially for the cultivation of mangrove, provides policy management of mangroves as coastal protection. The government is empowering the community to develop the skills and people skills. Should insurance is included in the admission ticket (levy) mangrove ecotourism "Kampoeng Nipah", so that the secure management principles can be realized.
Keywords: Management, Ecotourism, Conservation.

Pendahuluan

Pemeliharaan terhadap lahan di pantai masih kurang mendapat perhatian yang penuh, terutama pada hutan yang berada di kawasan pantai yang disebut dengan hutan Mangrove. Andaikata kawasan ini dikelola dengan baik akan mendatangkan pendapatan yang cukup tinggi bagi daerah sebagai peningkatan pendapatan daerah. Sebuah kasus yang terjadi di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi

Sumatera Utara, pengelolaan kawasan hutan tersebut pada asalnya belum digarap secara sungguh-sungguh. Pengelolaan hutan tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga belum bisa mendatangkan hasil yang cukup berarti bagi daerah.

Di daerah pesisir ekosistem mangrove telah menjadi sorotan yang cukup tajam bagi pembangunan daerah. Permasalahan utama yang muncul di kawasan hutan ini pengelolaan terhadap habitat hutan mangrove bersumber dari keinginan masyarakat untuk mengkonversi areal hutan menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersial, industri dan pertanian. Pada tahun 2006 kawasan mangrove yang berada di wilayah Kecamatan Perbaungan meliputi wilayah seluas 219,24 hektar. Dari keseluruhan kawasan mangrove di Kecamatan Perbaungan tersebut, seluruhnya mengalami kerusakan dengan tingkatan yang bervariasi. Wilayah yang termasuk dalam katetori rusak sedang meliputi wilayah seluas 128,6 hektar (58,6%), sementara sisanya, yaitu wilayah seluas 90,64 hektar (41,4%) berada dalam kondisi rusak berat.

Salah satu upaya untuk menekan angka kerusakan ekosistem mangrove, maka pariwisata mangrove diarahkan pada pengembangan ekowisata. Ekowisata adalah perpaduan antara pariwisata ke wilayah-wilayah alami, yang melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Konsep ekowisata merupakan salah satu alternatif untuk pengelolaan kawasan wisata dalam suatu wilayah yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Edi Mulyadi, et. al. "*Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Ekowisata*". Surabaya: Jurusan Teknik Lingkungan FTSP UPN "Veteran". 2010. Hasil penelitian tersebut menyampaikan tingkat kerusakan hutan mangrove semakin bertambah setiap tahunnya dikarenakan pertumbuhan penduduk sebesar 1.34% per tahun dan kepadatan penduduk

yang terus meningkat sebesar 3.84% per tahun sehingga 50% lahan mangrove rusak karena dibangun pemukiman, pelabuhan, dan pertambakan.

Diversifikasi fungsi hutan mangrove sebagai ekowisata akan berhasil jika penanaman mangrove terus dilakukan sesuai pola penanaman dan teknik penanaman yang baik. Terdapat 4 (empat) faktor yang berkontribusi positif terhadap pemeliharaan dan pelestarian hutan mangrove di kawasan Sungai Wain Balikpapan, yaitu kondisi umum hutan mangrove, peran serta dan kesadaran masyarakat, pelaksanaan kebijakan pemerintah dan dukungan Undang-undang, dukungan BLH dan Perguruan Tinggi.

Referensi selanjutnya penulis mengacu pada penelitian Muhaeri Muri. *Kajian Sumberdaya Ekosistem Mangrove Untuk Pengeloalaan Ekowisata Di Estuari Perancak, Jembrana, Bali*. Bogor : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. 2008. Muhaeri membahas pentingnya melakukan kajian potensi dan kondisi kawasan serta kesesuaian dan daya dukung ekosistem mangrove terhadap kegiatan ekowisata.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Muri Muhaerin menjelaskan indeks kesesuaian ekosistem untuk kegiatan wisata mangrove di Estuari Perancak termasuk ke dalam kategori sesuai (S) dan kategori sesuai bersyarat (SB). Terdapat 2 usulan lokasi track, yaitu track perairan dan track daratan. Nilai daya dukung kawasan track perairan adalah 165 dan track daratan adalah 172. Nilai daya dukung kawasan ini masih dapat berubah, disesuaikan dengan track yang akan dibuat oleh pihak pengelola.

Strategi alternatif pengelolaan ekowisata mangrove yang diprioritaskan di kawasan Estuari Perancak adalah membuat dan mengaplikasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam perlindungan ekosistem mangrove. Membangun komitmen dan kesadaran semua pihak dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Meningkatkan usaha pengelolaan ekosistem mangrove melalui kegiatan ekowisata.

Penelitian yang hendak dilakukan penulis memfokuskan pada

“Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Ekowisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah: Model penelitian deskriptif kualitatif, mengidentifikasi potensi yang ada di obyek penelitian, obyek penelitiannya sangat erat dengan hutan mangrove, pengembangan ekowisata yang melalui pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengelolaan hutan mangrove secara terpadu. Konsep penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan yang tampak sebelumnya hanya saja tetap ingin mengembangkan konsep penelitian yang ada, penulis bermaksud meneliti sejauhmana peranan pemerintah terhadap pengelolaan kawasan mangrove berbasis ekowisata melalui pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian sebelumnya lebih menekankan langkah teknis pengelolaan mangrove dari sisi pemberdayaan, perlindungan dan rehabilitas mangrove melalui ekowisata mangrove. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mengarahkan kepada sistem pengelolaan kawasan mangrove yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dengan konsep ekowisata mangrove dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan mangrove Kecamatan Perbaungan.

Kajian Literatur

Hutan mangrove yang biasanya juga disebut hutan bakau mempunyai karakteristik yang khas, mengingat hidupnya berada di daerah ekotone yaitu perairan dan daratan. Karakteristik mangrove ini terutama mampu berada pada kondisi salin (pertemuan/payau) dan tawar. Hutan mangrove terdapat di daerah pasang surut pantai berlumpur yang terlindungi dari gerakan gelombang dan di mana ada pasokan air tawar dan partikel-partikel sedimen yang halus melalui air permukaan. (C. Kusmono: 1997) Dalam pertumbuhan mangrove memerlukan suatu kondisi lingkungan tertentu. Kondisi lingkungan ini sangat mempengaruhi komposisi dan distribusi serta bentuk pertumbuhan mangrove. Hutan mangrove merupakan sumberdaya alam daerah tropis yang

mempunyai manfaat ganda dengan pengaruh luas ditinjau dari aspek sosial ekonomi dan ekologi. Besarnya peranan hutan mangrove atau ekosistem hutan mangrove bagi kehidupan dapat diketahui dari banyaknya jenis hewan, baik yang hidup di perairan, di atas lahan maupun di tajuk-tajuk pohon mangrove serta manusia yang bergantung pada hutan mangrove (N. Naamin: 1991). Dalam kerangka pengelolaan dan pelestarian mangrove, terdapat dua konsep utama yang dapat diterapkan. Kedua konsep tersebut pada dasarnya memberikan legitimasi dan pengertian bahwa mangrove sangat memerlukan pengelolaan dan perlindungan agar dapat tetap lestari. Kedua konsep tersebut adalah perlindungan ekosistem mangrove dan rehabilitasi ekosistem mangrove (Begen, D. G.: 2001).

Dimensi pengelolaan kawasan yaitu partisipasi masyarakat, kelembagaan, infrastruktur, keterlibatan swasta, transportasi, sumber daya manusia, peraturan dan kebijakan, pengelolaan lahan, peluang pekerjaan, kemitraan masyarakat, pemerintah dan swasta, finansial/keuangan dan manajemen promosi. Dari keseluruhan dimensi tersebut, akan dibahas dua dimensi saja, yaitu kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pengelolaan kawasan menyangkut *stakehold*. yang terlibat. Merujuk pada definisi pengelolaan kawasan mangrove berbasis ekowisata, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kawasan mangrove berbasis ekowisata adalah suatu rencana kegiatan mengelola potensi alam untuk mengembangkan pariwisata yang proaktif, peduli terhadap lingkungan hidup dengan mempromosikan konservasi alam.

Mangrove tidak dapat tumbuh di pantai yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut yang kuat, hal ini dikarenakan di kawasan ini tidak memiliki pantai yang landai sehingga tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur dan pasir, substrat yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Secara umum Mangrove memiliki karakteristik ekosistem mangrove, yaitu:

1. Umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya

berlumpur, berlempung atau berpasir.

2. Daerahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun tergenang hanya saat pasang purnama. Frekuensi genangan menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove.
3. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat.
4. Terlindung dari gelombang dan arus pasang surut yang kuat. Air bersalinitas payau (2-22 ‰) hingga asin (mencapai 38 ‰).
5. Banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuari, delta dan daerah pantai yang terlindung.

Dengan memperhatikan karakteristik tersebut, maka tidak setiap pantai dapat dikembangkan menjadi Mangrove yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Ciri khas inilah yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya yang disebabkan karena perbedaan lingkungan alam yang berbeda.

Kerangka logika yang dibangun dalam penelitian ini mendasarkan pada permasalahan bagaimana pengelolaan hutan mangrove tersebut menjadi sebuah ekowisata. Kajian ini akan dilihat dari tahapan proses pengelolaan kawasan mangrove berbasis ekowisata terdapat empat fase yang dilakukan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari indikator variabel tersebut dijabarkan ke dalam pertanyaan yang nantinya diharapkan memperoleh data hasil temuan di lapangan untuk dianalisis dan dibuat kesimpulannya.

Metode Penelitian

Penelitian pengelolaan ekowisata mangrove ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mengangkat hasil temuan lapangan untuk dianalisis secara mendalam per item atau indikator variabelnya. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta melibatkan responden yang memiliki peran penting. Peneliti ini mengambil di kawasan hutan mangrove Kecamatan Perbaungan, Kabupaten

Serdang Bedagai. Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Mangrove. Durasi waktu yang digunakan dalam penelitian yaitu satu bulan sampel sebanyak 9 orang yang terdiri dari beberapa komponen seperti:

1. Kepala Dinas Pariwisata : 1 orang
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan : 1 orang
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan : 1 orang
4. Kepala BPHM-II Medan : 1 orang
5. Masyarakat/Pengelola Ekowisata Mangrove : 5 orang
6. Wisatawan Ekowisata Mangrove : 5 orang

Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis akan memfokuskan diri pada persoalan-persoalan yang ada di Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara, sehingga memiliki kawasan pesisir yang cukup panjang. Penelitian ini akan menitik beratkan pada pengelolaan wisata yang dilakukan oleh Koperasi Serdang Usaha (KSU) "Muara Baimbai" yaitu partisipatif dan hijau. Konsep partisipatif dan hijau merupakan konsep yang mengakomodasi semua komponen yang terlibat untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan ekowisata dan sekitarnya, melalui upaya penyelesaian permasalahan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan upaya konservasi.

Desa Sei Nagalawan memiliki luas 875 Hektar yang memiliki kepadatan penduduk sudah mencapai 3.008 orang, dengan komposisi penduduk tetap 1.452 orang perempuan dan 1.556 orang laki-laki. Namun dengan keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumberdaya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak geografis Sei Nagalawan berada di wilayah utara Kabupaten Serdang Bedagai dengan memiliki fasilitas yang tidak selengkap di kabupaten lainnya. Sarana Umum desa ini memiliki Jumlah

Mesjid sebanyak 3 Buah, Mushola 3 buah, 3 buah, SD 1 buah, sedangkan SMP dan SMA belum ada. Untuk fasilitas Kesehatan meliputi Poliklinik Kesehatan Desa 1 buah, Bidan Desa 1 orang, sedangkan PUSESMA belum ada.

Penelitian lapangan seperti ini diharapkan akan mendapatkan hasil temuan di lapangan mengenai pengelolaan ekowisata mangrove “Kampoeng Nipah” di Desa Sei Nagalawan dengan mendasarkan pada empat indikator pengelolaan yakni; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan tinjauan literatur yang dibahas di depan. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu unsur utama dari kegiatan manajemen atau sering dikenal dengan pengelolaan kegiatan. Oleh karena merupakan unsur pertama, maka kegiatan merencanakan ini haruslah memiliki sasaran yang tepat. Dari hasil penelitian di lapangan penulis memperhatikan sistem perencanaan yang diterapkan oleh KSU “Muara Baimbai” adalah *sadar usaha*, *terorganisasi* dan *terus menerus*. Sistem ini dibuat guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif guna mencapai tujuan dasar kelompok yakni rehabilitasi mangrove dan pemanfaatan kawasan sebagai wisata edukasi. Kegiatan menyusun rencana ini dilakukan secara bersama antara warga setempat dengan pengelola ekowisata dan pemerintah setempat. Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Flora dan Fauna

Menindaklanjuti itu perencanaan pengelolaan kawasan hutan mangrove berbasis ekowisata di Desa Sei Nagalawan. Pihak pengelola KSU “Muara Baimbai”, temuan penulis di lapangan kelompok usaha yang dipimpin oleh Sutrisno sebagai ketua pengurus, dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove pihaknya melakukan perencanaan yang diharuskan sesuai tujuan yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pengembangan SDM

- b. Perencanaan Pengembangan Tata Ruang Kawasan
- c. Perencanaan Pengembangan Tata Ruang Kawasan
- d. Perencanaan anggaran

Dalam penyusunan rencana kegiatan usaha KSU “Muara Baimbai” banyak melibatkan swadaya masyarakat, dalam arti mengumpulkan masyarakat untuk menetapkan sasaran dan target yang ditetapkan maupun teknis pelaksanaan yang akan diterapkan secara operasional. Perencanaan ini adalah aktivitas mengembangkan masyarakat setempat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja KSU “Muara Baimbai” dengan memperhitungkan aspek-aspek yang mencakup di dalamnya antara lain; partisipasi, komitmen dan keterampilan. Tujuannya membantu dan memastikan bahwa KSU “Muara Baimbai” memperoleh tingkat kemampuan yang dapat meningkat dalam mempercepat pengembangan ekowisata mangrove “Kampoeng Nipah”.

Adapun bidang-bidang perencanaan yang dilakukan antara lain; perencanaan produksi, perencanaan tata ruang wisata, perencanaan penjualan, hingga perencanaan anggaran atau keuangan diatur sendiri oleh KSU “Muara Baimbai”. Dalam hal ini sistem perencanaan tersebut memakai konsep perencanaan *Bottom-up* yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi dari masyarakat dan disini pemerintah berperan sebagai fasilitator.

Pengorganisasian

Pengorganisasian dilakukan karena dalam pengelolaan kawasan mangrove berbasis ekowisata melibatkan banyak kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh KSU “Muara Baimbai” antara lain adalah pengorganisasian fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan menjadi bagian penting karena ketersediaan fasilitas pelayanan menjadi pertimbangan wisatawan untuk berkunjung. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, bahwa pengelolaan kawasan

mangrove telah menyediakan fasilitas maupun pelayanan yang prima terhadap konsumen. Berarti telah sesuai dengan prinsip dan kriteria pelaksanaan ekowisata.

Pada prinsipnya tekanan utama dalam pengorganisasian ini terletak pada kegiatan pengembangan fisik dan sarana wisata yang diperlukan oleh pengunjung. Sedangkan bentuk-bentuk pengorganisasian kegiatan fisik yang dilaksanakan dalam bentuk perawatan dan peremajaan fasilitas di antaranya :

1. Pembangunan *Jungle Tracking* (jembatan) dilokasi mangrove
2. Pembuatan jembatan penghubung dari lokasi mangrove ke pesisir pantai
3. Pembangunan kios jualan produk mangrove dan hasil nelayan
4. Pembangunan kantin/restoran sea food
5. Pembuatan *home stay* di lokasi mangrove
6. Pembuatan ruang sholat.
7. Pembuatan jalan setapak di lahan pantai menuju kawasan mangrove
8. Pembangunan fasilitas air bersih dan instalasi listrik
9. Pembuatan Joglo/pondok wisata di lokasi pantai maupun di lokasi mangrove
10. Pembuatan lokasi parkir yang nyaman
11. Pembuatan perahu penyeberangan ke lokasi wisata

Pengorganisasian promosi Temuan di lapangan KSU “Muara Baimbai” menerapkan pengorganisasian pemasaran dan promosi ekowisata mangrove melalui pemanfaatan media baik cetak maupun elektronik (Brosur, Website, dll). Ekowisata mangrove “Kampoeng Nipah” dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan, pemasaran yang bertanggung jawab. Materi pemasaran yang disampaikan akurat, jelas, berkualitas, dan sesuai dengan kenyataan.

Pengorganisasian produk/oleh-oleh wisata mangrove” diarahkan nuntuk menghasilkan produk unggulan berupa oleh-oleh dan souvenir yang merupakan ciri khas bagi KSU “Muara Baimbai” dalam mengelola kawasan

hutan mangrove berbasis ekowisata melalui pemanfaatan sumberdaya mangrove yang dikelola dalam bentuk makanan.

Jenis-jenis produk yang dijual KSU “Muara Baimbai”, antara lain sebagai berikut :

1. Kerupuk Jeruju
2. Dodol Api-api
3. Sirup Perpat/Pidada
4. Teh Jeruju
5. Selimut Api-api
6. Kue Kering Selai Perpat

Pengorganisasian pengunjung dalam hal ini untuk menciptakan kepuasan akses pelayanan yang diterima wisatawan. Tujuannya agar kegiatan ekowisata mangrove dapat saling memberikan manfaat antar pengelola dan pengunjung. Hasil penelitian di lapangan, penulis memperoleh data pengunjung yang setiap tahun meningkat jumlahnya. Peningkatan ini dinilai karena daya tarik yang ditawarkan kawasan ekowisata mangrove “Kampoeng Nipah”, bukan sekedar menawarkan wisata alam tetapi menawarkan fasilitas konservasi, edukasi mangrove, wisata bahari dan wisata kuliner.

Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengembangan kelembagaan pengelola kawasan mangrove berbasis ekowisata oleh KSU “Muara Baimbai”. Kegiatan awal dimulai dengan penilaian bersama terhadap potensi (kekuatan, hambatan, peluang, dan tantangan). Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan mangrove berbasis ekowisata KSU “Muara Baimbai” melakukan prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut; pelestarian, pendidikan, pariwisata, perekonomian, partisipatif

Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan mangrove berbasis ekowisata KSU “Muara Baimbai” melakukan prinsip-prinsip pengelolaan

sebagai berikut; pelestarian, pendidikan, pariwisata, perekonomian dan partisipasif.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan mangrove berbasis ekowisata KSU “Muara Baimbai” melakukan prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut ;

1. Pelestarian

Pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan pada eksploitasi. Strategi manajemen kapasitas akan menjadi pilihan yang terbaik, walaupun saat ini masih mengalami kontroversi yang cukup tajam. Konsep ini merupakan kebutuhan yang semestinya diakui untuk membatasi dan menjadi kendali atas dimensi-dimensi pembangunan pariwisata yang dapat mengancam berkelanjutan penggunaan sumber daya yang terbatas, pada saat yang bersamaan, konsep tersebut berhadapan dengan keinginan untuk memaksimalkan peluang sebagai tujuan pertumbuhan dan mewujudkan manfaat potensial yang terkait dengan pengunjung yang semakin meningkat.

2. Pendidikan

Prinsip pendidikan yang dimaksudkan adalah melakukan program peningkatan sumberdaya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata sehingga dapat dipastikan bahwa para pekerja siap untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga program sertifikasi akan menjadi pilihan yang tepat. Sertifikasi sebagai proses untuk meningkatkan standar industri memiliki pendukung dan nilai kritik. Bagian ini sebenarnya meninjau kelayakan sertifikasi sebagai alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela, di bawah **lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, dan integrasi.**

3. Pariwisata

Pembangunan pariwisata harus dapat dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal, visi pembangunan pariwisata mestinya dirancang berdasarkan ide masyarakat lokal dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Pengelolaan kepariwisataan yang telah dibangun mestinya juga melibatkan masyarakat lokal sehingga masyarakat lokal akan merasa memiliki rasa memiliki untuk peduli terhadap keberlanjutan pariwisata. Masyarakat lokal harusnya menjadi pelaku bukan menjadi penonton.

4. Perekonomian

Pembangunan sektor pariwisata harus melibatkan para pemangku kepentingan, dan melibatkan lebih banyak pihak akan mendapatkan input yang lebih baik. Pelibatan para pemangku kepentingan harus dapat menampung pendapat organisasi kemasyarakatan lokal, melibatkan kelompok masyarakat miskin, melibatkan kaum perempuan, melibatkan asosiasi pariwisata, dan kelompok lainnya dalam masyarakat yang berpotensi mempengaruhi jalannya pembangunan. Sehingga dengan pelibatan pemangku kepentingan tersebut, pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada/berdomisili dikawasan objek wisata. Tidak hanya pengelola yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut akan tetapi manfaat langsung juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya.

5. Partisipatif

Untuk meningkatkan partisipasi bagi semua pemangku kepentingan, perlu adanya kerjasama antara masyarakat lokal sebagai creator atraksi wisata dengan para operator penjual paket wisata, sehingga perlu dibangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Misalnya, berkembangnya sanggar tari, kelompok tani, dan lainnya karena mendapatkan keuntungan dari berkembangnya sector pariwisata. Sementara para operator sangat berkepentingan terhadap eksistensi dan keberlanjutan atraksi wisata pada wilayah pariwisata. Idealnya harus ada

keseimbangan permintaan dan penawaran yang berujung pada kepuasan wisatawan, namun demikian dalam praktiknya akan ada perbedaan mendasar antara masyarakat lokal dan wisatawan sehubungan dengan perbedaan-perbedaan sikap terhadap pembangunan itu sendiri.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan mangrove berbasis ekowisata KSU “Muara Baimbai” menerapkan prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut; aman, sinergi, ramah dan inspiratif.

Pengawasan

Pengawasan pengelolaan kawasan mangrove berbasis ekowisata dilakukan dengan merujuk pada komponen yang diawasi, sosialisasi dan transparansi. Pengelolaan kawasan hutan mangrove berbasis ekowisata di Desa Sei Nagalawan II Kecamatan Perbaungan merupakan tanggungjawab dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan pengawasan oleh Dishutbun Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut;

1. Kegiatan Preventif yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan hutan, tindakan ini dilakukan dengan prosedur antara lain:
 - a. Patroli berkala
 - b. Pemeriksaan dokumen hasil hutan
 - c. Membeikan penjelasan kepada masyarakat terkait cek lokasi tanah masyarakat terhadap kawasan hutan.
2. Represif yaitu kegiatan penindakan terhadap pelanggaran dalam kawasan hutan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian.

Selanjutnya landasan hukum untuk pengawasan perlindungan hutan, bagi pelaksanaan pengamanan kawasan hutan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor.45 tahun 2004 tentang “Perlindungan Hutan”. Berikut kriteria tindakan pelanggaran perusakan sesuai PP. No.45 tahun 2004, Pasal 14 sebagai berikut;

1. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan hanya dapat

dilakukan apabila telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

2. Termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin ialah :
 - a. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang diberikan izin;
 - b. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan melebihi target volume yang diizinkan;
 - c. pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/ quota yang telah ditetapkan;
 - d. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Sanksi pidana yang diberikan bagi tindakan pelanggaran perusakan kawasan hutan mangrove, yang mengacu pada PP. No.45 tahun 2004, BAB V “Sanksi Pidana”, Pasal 43 sebagai berikut; Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Selanjutnya, pengawasan yang diterapkan oleh KSU “Muara Baimbai” dalam mengawasi kegiatan wisatawan adalah dengan memandu wisatawan dan memberi himbauan-himbauan tentang larangan, seperti tidak membuang sampah di sungai, tidak memetik tanaman mangrove dan lain sebagainya. Kendala yang dihadapi saat mengawasi wisatawan yakni; belum ada kesadaran dari wisatawan untuk menjaga kebersihan lingkungan ekowisata. Wisatawan masih membuang sampah di sembarang tempat, padahal tersedia tempat pembuangan sampah. Pengawasan manajemen kelompok KSU “Muara Baimbai” dilakukan anggota kelompok melalui laporan harian, bulanan sampai tahunan. Materi yang dilaporkan berupa; pendapatan

retribusi wisata, penjualan produk oleh-oleh dan makanan, penyewaan joglo/pondok wisata, pendapatan paket wisata, pendapatan kutipan parkir.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian pengelolaan kawasan hutan mangrove sebagai ekowisata adalah usaha ini memberi peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah tempat tinggalnya. Hanya diperlukan perhatian dan pembinaan yang serius dari pemerintah.

Pengelolaan kawasan mangrove sebagai lokasi ekowisata dengan menerapkan perencanaan yang tepat dan terarah, telah menjadikan kawasan hutan mangrove pada Kabupaten Serdang Bedagai khususnya di Kecamatan Perbaungan mampu mengembalikan fungsi hutan yang sesungguhnya dan memiliki manfaat nilai ekologi dan ekonomi.

KSU “Muara Baimbai” merupakan kelompok usaha masyarakat yang sangat cepat mengalami kemajuan di bidang manajemen pengelolaan. KSU “Muara Baimbai” melakukan sistem manajemen pengelolaan yang baik dilihat dari hasil yang ditunjukkan, usaha yang dikembangkan memiliki daya tarik penunjang yang terus meningkat setiap bulan hingga tahunnya. Inovasi pengelolaan komoditi unggulan semakin dikembangkan, pendapatan dari hasil pengelolaan wisata memberi pemasukan yang sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya.

Pertumbuhan mangrove mengalami peningkatan yang pesat dan hasil tangkap laut semakin membaik. Peran serta perempuan-perempuan pesisir yang turut andil mengelola lokasi wisata melalui kreatifitas Ibu-ibu kelompok KSU “Muara Baimbaai”. Kreatifitas ibu-ibu memanfaatkan mangrove sebagai bahan makanan menjadi nilai tambah ekowisata mangrove “Kampoeng Nipah”.

Pelaksanaan pengendalian kerusakan mangrove mencapai hampir 50% dari konversi lahan, dilakukanlah pembentukan kelompok masyarakat yang sadar akan lingkungan melalui swadaya masyarakat. Pelaksanaan

pengendalian kerusakan lahan dilakukan dengan membentuk kawasan ekowisata mangrove, dengan menciptakan wisata alam melalui kegiatan konservasi dan edukasi.

Kurangnya pengawasan pemanfaatan lahan menyebabkan kerusakan pada kawasan hutan mangrove, kerusakan ini terjadi karena kecenderungan alih fungsi lahan. Dengan adanya kerjasama sosialisasi dan pembinaan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai secara intensif kepada masyarakat. Hal ini memberi solusi dan pengaruh positif bagi kesadaran masyarakat menjaga kawasan hutan mangrove.

Saran

Saran penulis untuk pemerintah melengkapi fasilitas umum seperti: perbaikan jalan, pendanaan dan pembangunan wisata. Pemerintah memberikan alokasi ruang lebih luas, khusus untuk budidaya mangrove, memberikan kebijakan pengelolaan mangrove sebagai pelindung pantai. Pemerintah lebih memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan keterampilan dan kecakapan masyarakat. Hendaknya asuransi sudah termasuk dalam tiket masuk (retribusi) ekowisata mangrove “Kampoeng Nipah”, sehingga prinsip aman dalam pengelolaan dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Afifuddin, H. *“Metode penelitian kualitatif”*. Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Begen, D.G. *“Pengenaln & Pengelolaan Ekosistem Mangrove”*. Pedoman Teknis, PKSPL IPB, Bogor2000.
- Bahar. *“Berganda Hutan Mangrove di Sumatera”*. Bogor : PPLH. IPB. 2004
- _____. D. G. *“Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan”*. Bogor : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor (IPB). 2001.
- Dahuri ,R, J.Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. *“Pengelolaan Sumberdaya*

- Paramita. 1996. *Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya
- Dahuri. *"Pengembangan Rencana Pengelolaan Pemanfaatan Berganda Hutan Manrove di Sumatera"*. Bogor : PPLH. IPB. 1996.
- Ghufran, M. dkk. *"Ekosistem Mangrove ; potensi, fungsi dan pengelolaan"*. Jakarta: Rineka Cipta: 2012.
- Harahab Nuddin *"Penilaian Ekonomi ekosistem Hutan Mangrove & Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir"* Yogyakarta, Graha Ilmu : 2010
- Kusmono, C. *"Ekologi dan Sumberdaya Ekosistem Mangrove, Makalah Pelatihan Pengelolaan Hutan Mangrove Lestari Angkatan I PKSPL"*. Bogor.Institut Pertanian Bogor (IPB): 1997.
- Moleong, Lexy J. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Naamin, N. *"Penggunaan Lahan Mangrove Untuk Budidaya Tambak Keuntungan dan Kerugiannya"*. Dalam Subagjo Soemodihardo et al. Proseding Seminar IV Ekosistem Mangrove. Panitia Nasional Pangan MAB Indonesia LIPI. 1991.
- Santoso, N. *"Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan di Indonesia"*. Dalam bahan pelatihan. *"Training Workshop on Developing The Capacity of Environmental NGOs in Indonesia to Effeticvely Implement Wetland Project According to the Ramsar Guidelines and Obyectives of the Convention on Biodiversity"*. Bogor. 2006.
- Soerianegara, I. *"Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Ekosistem Mangrove di Indonesia"*. LIPI-Yayasan LPP Mangrove. 1993.
- Sudjana. *Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung : Falah Production2000.
- Wibowo. *"Dampak Pengembangan Ekowisata Kawasan Wisata Gunung Merapi-Merbabu Terhadap Perubahan Struktur Masyarakat"*. Surakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, UMS. 2007.